

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kabupaten Kaimana Papua Barat

Jonston Zosadak

Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: zosadak@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kaimana dituntut untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Kaimana, serta mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa beragamnya aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah menyebabkan kesulitan dalam integrasi data dan pemborosan biaya. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan dan sistem informasi akuntansi secara nasional, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. SIPD dalam implementasinya ditemukan sejumlah masalah seperti ketidakcocokan infrastruktur, resistensi dari pegawai, serta biaya penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi dan pengalaman pegawai dalam penerapan SIPD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD memiliki potensi untuk meningkatkan integrasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, SIPD masih menghadapi tantangan teknis dan non-teknis. Diperlukan upaya perbaikan dalam hal pelatihan, peningkatan server, penambahan fitur dan dukungan kebijakan agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: SIPD, Efektivitas, Efisiensi, Sistem Informasi Akuntansi

ABSTRACT

As a region rich in natural resources and with great potential for development, the Kaimana Regency Government is required to maximize the use of technology in governance, one of which is through the implementation of the Regional Government Information System (SIPD). This study examines the effectiveness and efficiency of the Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), or Regional Government Information System, in the financial management of the Kaimana Regency Government. It also evaluates the challenges and obstacles encountered during its implementation. The proliferation of various applications used by local governments has resulted in difficulties with data integration and increased operational costs. SIPD was introduced as a national-scale financial management and accounting system aimed at enhancing efficiency, transparency, and accountability in regional budget administration. However, its implementation has been hindered by several issues, including infrastructure incompatibility, employee resistance, and higher operational costs compared to previous systems. This study employs a qualitative approach to analyze employee perceptions and experiences regarding SIPD's implementation, identifying key factors affecting its effectiveness and efficiency. The findings indicate that, while SIPD holds promise for improving integration and transparency in regional financial management, it continues to face both technical and

non-technical challenges. To optimize its implementation, enhancements in training programs, server infrastructure, system functionalities, and policy support are necessary.

Keywords: SIPD, Accounting Information System, Effectiveness, Efficiency

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Teknologi informasi sangat membantu dan menjadi penting dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan. Penerapan teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi (Askal Basir, 2021; Bambang Suprianto, 2023; Basir, 2021; Meilina dkk., 2021; Yoraeni dkk., 2022). Penerapan teknologi informasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi ini sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik (good governance) terutama dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas pengendalian yang bisa diterapkan pada teknologi tersebut. Penerapan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi (Bambang Suprianto, 2023; Laila dkk., 2021).

Beragamnya aplikasi mengakibatkan pemborosan dalam biaya pemakaian aplikasi dan biaya pelatihan aplikasi di setiap Pemerintah Daerah. Namun, aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi, sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara karena dikerjakan pihak ketiga alias vendor melalui lelang maupun penunjukan langsung. Mutu pelayanan yang efektif, efisien, dan terbuka dapat terpenuhi dengan baik jika implementasi e-gov berbasis pada sistem jaringan TIK yang terintegrasi dan terstruktur. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikenal dengan istilah e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau internet (Fahyuni, 2017; Primawanti & Ali, 2022; Purba dkk., 2020).

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, terus mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna memperbaiki manajemen sumber daya dan pelayanan publik. Kemendagri melakukan launching Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada 10 Desember 2022 sebagai aplikasi umum bagi pemda. Sampai saat ini Pengembangan SIPD secara terus menerus dilakukan, dan juga merupakan bagian dari program yang lebih luas, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah kerangka besar yang dirancang untuk mentransformasi birokrasi melalui digitalisasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik di semua tingkatan pemerintahan. Dengan mengintegrasikan SIPD ke dalam SPBE, pemerintah berharap bisa menghilangkan masalah beragamnya aplikasi yang selama ini digunakan di berbagai daerah, sehingga dapat memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. SIPD juga diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih sistem, menekan biaya operasional, dan meningkatkan akurasi serta kecepatan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan. SIPD dapat menghimpun data daerah menjadi satu dan memastikan proses yang sama di setiap daerah yang

menggunakan, yaitu perencanaan daerah, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pelaporan, monitoring, dan evaluasi hingga pemanfaatan untuk analisis data dan pengambilan kebijakan.”

Secara nasional capaian nilai indeks SPBE tahun 2020 adalah sebesar 2,26 yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE secara nasional masih berada di level 2 dengan predikat "Cukup" pada skala 5 (level 1: kurang, level 2: cukup, level 3: baik, level 4: sangat baik, dan level 5: memuaskan), dimana penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo). Melihat data yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE secara nasional masih belum memuaskan, diperlukan peningkatan SPBE di seluruh aspek, khususnya dalam hal kolaborasi dan integrasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Beragamnya aplikasi juga mengakibatkan pemborosan dalam biaya pemakaian aplikasi dan bimbingan teknis pemakaian aplikasi yang berbeda-beda di setiap Pemerintah Daerah. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah beragam aplikasi memiliki kemampuan Perangkat Lunak untuk dimodifikasi yang beerbeda-beda. Modifikasi meliputi koreksi, perbaikan atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsional. Aspek maintenance menjadi sangat penting mengingat adanya peraturan yang terus berubah, sehingga sistem informasi yang digunakan harus mampu menyesuaikan diri secara efektif dengan dinamika regulasi tersebut. Banyaknya aplikasi jika tidak dimaksimalkan dengan baik hanya akan menjadi masalah. Lebih baik sedikit tapi penggunaannya maksimal dan saling terhubung.

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki status sebagai wilayah otonomi khusus (otsus) (Undang-Undang No. 2, 2021). Status ini memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan anggarannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kaimana dituntut untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemkab Kaimana telah melaksanakan pelatihan agar konsisten dalam menerapkan regulasi terkait penatausahaan keuangan daerah dan penggunaan SIPD, sehingga ke depan proses pengelolaan keuangan di daerah ini dapat lebih efisien, efektif, dan lebih mudah diaudit.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di berbagai daerah. Penelitian oleh Vitriana (2021) menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kota Pekanbaru yang belum optimal, komunikasi yang berjalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum efektif hanya secara online melalui zoom sehingga informasi kurang jelas. Sementara itu, studi oleh Nasution (2021) di BPKAD Kota Medan menyoroiti BPKAD Kota Medan untuk lebih meningkatkan kegiatan bimbingan teknis dalam menggunakan SIPD karena penggunaan SIPD belum optimal. Penelitian lain oleh Arif (2024) menemukan beberapa kelemahan dan risiko yang perlu diatasi oleh BPKAD Kabupaten Karanganyar seperti meningkatkan pemahaman implementasi SIPD RI, dan menetapkan peraturan pendukung terkait penggunaan SIPD RI.

Berbeda dengan daerah-daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaimana memiliki karakteristik geografis, sumber daya, dan kondisi infrastruktur yang berbeda, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas dan efisiensi implementasi SIPD di Kabupaten Kaimana, serta

mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi Kabupaten Kaimana yang termasuk dalam daerah otsus.

Implementasi SIPD di Kabupaten Kaimana tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya literasi digital sebagian pegawai pemerintah daerah. Tantangan ini menjadi perhatian penting karena keberhasilan penerapan SIPD sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan SIPD telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi di Kabupaten Kaimana, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan implementasi SIPD di wilayah tersebut. Dalam penerapannya terdapat masalah dalam mengimplementasi SIPD di berbagai daerah, seperti masalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya, resistensi pegawai terhadap aplikasi baru, keterbatasan Kemendagri dalam menangani masalah yang beragam pada seluruh daerah, dan tujuan-tujuan pembuatan aplikasi yang seragam menjadi tidak tercapai (Afifah dkk., 2023; David & Ohoiwutun, 2022; Sari, 2022; Sobandi dkk., 2023; Vira & Husna, 2022a, 2022b). Berawal dari hal tersebut, maka dirasa perlu untuk membuat penelitian dengan judul: Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana Di Papua Barat.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi masalah implementasi SIPD yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana di Papua Barat. Menganalisis efektivitas dan efisiensi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Kaimana Papua Barat.. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Penelitian ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan kajian ilmiah penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan hubungan antara efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi yang seragam. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi operasional dalam proses akuntansi dan pelaporan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan sistem atau peningkatan implementasi SIPD di Pemerintah Daerah. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SIPD, seperti peningkatan infrastruktur dan pelatihan pegawai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2018) untuk menjelaskan fenomena alamiah atau buatan dengan fokus pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan, serta mengumpulkan data yang mendeskripsikan orang, kejadian, atau situasi, termasuk informasi kualitatif seperti cara manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi (Sekaran, 2017). Metode ini berfokus pada pemahaman konteks luas melalui persepsi, opini, dan pengalaman subjek penelitian untuk mengevaluasi penerapan SIPD, keberhasilannya, serta tantangan dalam implementasinya di Pemerintah Kabupaten Kaimana Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dinamika penerapan sistem serta dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Metode Pengumpulan Data

Uma Sekaran (2017) Mengatakan bahwa data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian adalah sangat penting karena tujuan peneliti mendapat data yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, telaah dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang efektif, terutama selama tahap penelitian eksploratif. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon, atau komputer.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung, serta data sekunder berupa artikel, catatan, pedoman, dan dokumen resmi terkait implementasi SIPD di Indonesia. Setelah terkumpul, data tersebut divalidasi untuk memastikan keabsahannya berdasarkan kriteria tertentu guna meningkatkan validitas hasil penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2018). Reliabilitas antarpemilai diukur melalui konsistensi antarpengode dalam memproses data, sementara validitas mencakup ketepatan data (validitas internal) dan kemampuannya untuk digeneralisasikan (validitas eksternal) (Sekaran, 2017). Metode yang digunakan meliputi pemilihan kasus representatif dan kasus penyimpangan, serta triangulasi data untuk memperkuat reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Efektivitas SIPD

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan (Mahmudi 2015). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Indikator Efektivitas dalam konteks manajemen publik menurut Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015) efektivitas dapat diukur melalui:

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dalam pengimplementasian SIPD merupakan salah satu indikator dalam menentukan efektivitas aplikasi SIPD dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pasal 6 berbunyi;

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

SIPD dapat menghasilkan layanan informasi kompilasi maupun parsial Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah yang menggunakannya. Sejak tahun 2020, seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia yaitu 514 yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kota, dan Provinsi menggunakan SIPD Perencanaan dan Penganggaran. Kemendagri dapat mengawasi dan mengawasi perencanaan dan penganggaran di seluruh Pemerintah Daerah dengan SIPD. Kemendagri dapat menggunakan data tersebut untuk menganalisis dan menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Wawancara terhadap Bapak Edwin Alonggi E. saat peralihan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam menggunakan SIPD sebagai berikut

“Kemudian pada saat beralih di 2020 saat beralih itu memang awalnya agak sulit. Tapi SIPD pada waktu itu SIPD merah (monolith) itu memang dia user GUI (Graphical User Interface) nya, itu sangat familiar. Jadi lebih mudah pak. Operasionalnya juga lebih mudah. Jadi kayaknya SIPD tidak terlalu banyak kendala sekitar butuh penyesuaian 6 bulanan.”

Wawancara dengan Boestami Aziz terkait pelaporan pada SIPD berikut hasil wawancaranya

“Ya untuk laporan bisa dipantau pusat tapi kami tidak tahu bagaimana dipantaunya, mereka tahu yang terlambat kabupaten mana seperti itu. Untuk kirim laporan atau dokumen terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana upload semua diminta di upload di aplikasi, sehingga pusat harusnya bisa langsung ambil”

Hal tersebut didukung oleh wawancara dengan Edwin Allongi dengan hasil wawancara sebagai berikut

“Ya laporannya lebih komplit. Kemudian untuk kita bisa query ya. Waktu itu Saya butuh data dalam bentuk Excel untuk saya olah lebih lanjut. Itu bisa waktu itu. Lumayan lengkap pak. Untuk pusat yang memantau Oh nggak tahu ya pak. Mungkin dipantau dari situ cuman kami gak tahu. kalo terlambat mereka tahu sih. Mungkin kalau terlambat apabila belum dikabupaten. Mungkin di Pantau dari situ sih.”

2. Pencapaian Tujuan

Efektivitas SIPD dapat diukur berdasarkan kemampuannya memenuhi target pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi APBD. Implementasi yang baik memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi program pembangunan secara terintegrasi dengan kebijakan nasional. Namun, efektivitas ini bergantung pada optimalisasi penggunaan sistem oleh daerah, termasuk penyajian data real-time untuk pengambilan keputusan strategis. Seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Ruskanda, Pemerintah Kabupaten Kaimana baru memanfaatkan SIPD untuk perencanaan dan penganggaran, sementara modul akuntansi belum digunakan, meskipun dokumen seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA OPD telah berhasil dihasilkan secara lengkap dan mudah diakses.

Kendala utama dalam implementasi SIPD di Kabupaten Kaimana adalah masalah teknis, seperti gangguan server yang menyebabkan akses terhambat selama dua bulan, sehingga proses penyesuaian RKPD molor dari September hingga November 2024.

Menurut Bapak Edwin Allonggi, respons pusat terhadap keluhan ini cenderung lambat, meskipun tidak menimbulkan kerugian administratif langsung. Namun, keterlambatan semacam ini berpotensi mengganggu jadwal pengesahan APBD, menghambat program pembangunan, dan mengurangi kepercayaan publik. Selain itu, SIPD belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan, seperti penyediaan fitur query untuk analisis indikator kinerja, sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada sistem lain dari Pusdatin Kemendagri.

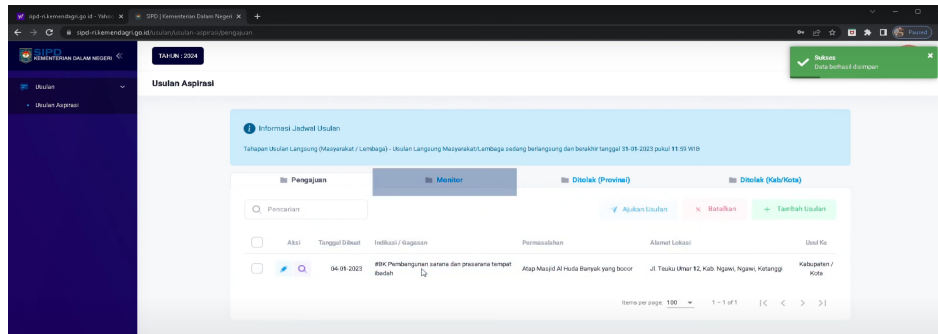
Secara nasional, Kemendagri baru dapat memantau laporan keuangan secara real-time di 336 pemerintah daerah yang telah menggunakan modul akuntansi SIPD, sementara 178 daerah lainnya masih tertinggal, menghambat integrasi Satu Data Indonesia. Evaluasi kinerja daerah pun masih mengandalkan mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) oleh Inspektorat Provinsi. Untuk meningkatkan efektivitas SIPD, diperlukan perbaikan infrastruktur teknis, respons cepat terhadap gangguan, serta pengembangan fitur yang lebih komprehensif, khususnya dalam modul perencanaan dan akuntansi, agar seluruh daerah dapat beralih sepenuhnya ke sistem terpadu ini.

3. Kepuasan Masyarakat

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui transparansi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan SIPD, masyarakat dapat memantau alokasi anggaran dan pelaksanaan program, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kemampuan kepala desa dalam menginput hasil musrenbang, sehingga memerlukan bantuan staf BAPPEDA. Selain itu, meskipun SIPD memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui menu usulan aspirasi dan monitoring, akses masyarakat terhadap laporan penganggaran masih terbatas karena belum disediakan oleh Kemendagri.

Efektivitas SIPD juga tercermin dari kemampuannya mempercepat layanan publik dan mengurangi hambatan birokrasi, sehingga program pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat. Sistem ini mendorong pemerintahan yang akuntabel dan demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, seperti melalui input hasil musrenbang oleh kepala kampung. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman kepala kampung terhadap fitur SIPD, termasuk status usulan yang diterima atau ditolak, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sosialisasi. Dengan optimalisasi SIPD, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

Masyarakat dan Kepala Kampung dari hasil Musrenbang kampung dapat menginput aspirasi dan hasil Musrenbang kampung tersebut melalui menu usulan aspirasi.



Gambar 1. Tampilan menu aspirasi Masyarakat pada SIPD RI

Terdapat menu Monitoring yang memungkinkan pengusul maupun pelaksana usul untuk melihat usul yang sudah diproses ataupun ditolak.

4. Keberlanjutan Program, Kemampuan program untuk terus berjalan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan program pemerintah daerah melalui penyusunan kebijakan berbasis data yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Sejalan dengan inisiatif Satu Data Indonesia (SDI), SIPD memastikan konsistensi data antarsektor, memudahkan akses, dan mendukung perencanaan yang lebih akurat, sehingga mengurangi risiko ketidaksesuaian program akibat perubahan kebijakan atau kepemimpinan. Selain itu, SIPD memungkinkan evaluasi program yang lebih efektif, memfasilitasi replikasi atau peningkatan program yang berhasil untuk manfaat jangka panjang.

Keberlanjutan SIPD juga didukung oleh Strategi Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan pemerintahan digital yang efisien dan terintegrasi. Dengan mengadopsi prinsip SPBE, SIPD membantu pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, mengurangi risiko inefisiensi atau penyalahgunaan dana yang dapat mengancam kelangsungan program. Integrasi SIPD dengan platform digital lain dalam ekosistem SPBE juga meminimalkan ketergantungan pada sistem manual yang rentan kesalahan, sehingga memperkuat adaptasi pemerintah daerah dalam memberikan layanan berkelanjutan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kaimana, implementasi SIPD baru mencakup modul Perencanaan dan Penganggaran sejak 2020, dengan rencana penggunaan modul Akuntansi dan Pelaporan pada 2025. Meskipun pemahaman pegawai terhadap SIPD cukup baik—seperti diungkapkan oleh Bapak Ruskanda (Inspektorat) dan Bapak Boestami Aziz (BPKAD)—pemanfaatan SIPD oleh Inspektorat untuk evaluasi perencanaan dan penganggaran belum optimal. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat perlu melakukan reviu sistem secara berkala guna memastikan kesesuaian proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi reviu pada proses perencanaan untuk memeriksa kesesuaian dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menilai apakah program yang dirancang sudah selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Sementara dalam aspek penganggaran, reviu memastikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sesuai dengan regulasi seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak

mengalami tumpang tindih dan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ruskanda Staf di Inspektorat terkait Pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran di SIPD.

“Kalau itu biasanya sih ada informasi dari teman-teman yang ada di bagian keuangan pak. Yang bisa kasih update informasi. Misalnya se-updatenya OPD mana yang harus ditambah anggarannya yang dikurangi. Audit ya audit (Audit SIPD dan Audit menggunakan SIPD). Belum sih. Evaluasi juga tidak ada pak.” Iya (Inspektorat) hanya konsultasi di keuangan saja pak ini”

Tabel 1. Hasil Wawancara Efektivitas

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara (efektivitas)			Simpulan
		Edwin Allongi (BAPPEDA)	Ruskanda (Insp.)	Boestami Aziz (BPKAD)	
1	Bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan melalui SPD? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan sistem sebelumnya?	Ya laporannya lebih komplit. Kemudian untuk kita bisa query ya. Waktu itu saya butuh data dalam bentuk Excel untuk saya olah lebih lanjut. Itu bisa waktu itu. Lumayan lengkap pak.	Kalau itu sih cepat sih laporannya keluar.	Lengkap pak, kita juga upload laporan sebagai dokumentasi di SIPD	Terdapat peningkatan kualitas laporan yang dihasilkan dan dapat diakses lebih cepat dan dimana saja
2	Berapa lama proses penyesuaian pegawai agar SIPD dapat digunakan? Apakah SIPD mudah digunakan?	Kemudian pada saat beralih di 2020 saat beralih itu memang awalnya agak sulit. Tapi SIPD pada waktu itu SIPD merah itu memang dia user GUI nya, Graph User Interface itu sangat familiar. Jadi kayaknya SIPD tidak terlalu banyak kendala sekitar butuh penyesuaian 6 bulanan. Sudah bisa waktu itu		Staff mudah dalam menginput SIPD Perencanaan dan Penganggaran, hanya awal-awal jika belum biasa, bilang kalau suka lupa-lupa urutannya. Mereka terbantu dalam menu yang jelas di SIPD	Penyesuaian saat beralih tergolong cepat, tidak melebihi 1 Tahun Anggaran. Penggunaan SIPD tidak ada kendala, dibantu dengan GUI dan menu yang jelas.
3	Apakah penggunaan SIPD meningkatkan pemahaman atau kompetensi pegawai terhadap pengelolaan keuangan daerah?	Pasti bisa lah karena ngecek-ngecek. Kalau lagi apa namanya asistensi penyesuaian RKPD kan pasti mereka buka pak.	(selain operator yang menggunakan SIPD) nya bisa juga Pak Idin.	Teman-teman di penganggaran paham semua Pak	Penggunaan SIPD Perencanaan dan Penganggaran di Pemkab Kaimana membantu dan mendorong pemahaman pegawai
4	Apakah Kabupaten Kaimana selalu tepat waktu selama penyampaian laporan keuangan ke pemerintah pusat	Selalu tepat waktu pak, seingat saya belum pernah mendapat teguran dari pusat	Kalau itu biasanya sih ada informasi dari teman-teman yang ada di bagian keuangan pak yang	Sudah ada timelinenya pak, kita sesuai timeline	Pelaporan Laporan Perencanaan dan Keuangan di Pemkab Kaimana selalu tepat waktu.

	pusat? Jika tidak, apa kendalanya	bisa kasih update informasi.		
5	Bagaimana respon kemendagri terhadap error atau masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kaimana?	Agak lama responnya pak, Slow response.	Biasanya kalau error kita lapornya malah ke BAPPEDA saja pak Ijin	Ditanggapi tapi tidak cepat, karena hanya dipusat saja dan (menangani) semua pemda Respon Kemendagri terhadap error yang dihadapi Pemkab Kaimana tergolong lama, tetapi tidak ada masalah keterlambatan pelaporan atau kualitas laporan yang menurun.

B. Efisiensi SIPD

Indikator Efisiensi dalam konteks manajemen publik menurut Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015) efisiensi dapat diukur berdasarkan:

1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program

Aplikasi SIPD dalam biaya penggunaan langsungnya, "SIPD digunakan Pemda secara gratis dan pembaharuan sistem aplikasi akibat perubahan regulasi tidak akan menjadi beban biaya Pemda. SIPD ini berbagi pakai dan berbagi data dengan pihak stakeholders lainnya terkait dengan aktivitas Pemda," (Fatoni, 2022). Terdapat biaya tidak langsung seperti diklat, biaya pengadaan teknologi yang sesuai, dan penambahan Sumber Daya Manusia untuk penggunaan SIPD di Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu didalami. Boestami Aziz selaku Kabid Penganggaran BPKAD Kabupaten Kaimana menjelaskan hal tersebut.

"Kita pakai dari tahun 2020 dan gratis pak, pada tahun pertama diundang untuk sosialisasi SIPD oleh pusat, lalu tidak ada lagi (biaya)".

Hal tersebut didukung oleh Pak Ruskanda (2024) selaku staff di Inspektorat Kabupaten Kaimana dalam wawancaranya.

"Memang waktu itu yang ke Jakarta cuma dari keuangan sama Bapeda. Untuk pendalaman dulu. Pertama kali Baliknya baru melakukan teman-teman lain Di PPM kan."

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edwin Allongi (2024) Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA Kaimana.

"Tidak keluar biaya perjalanan dinas pak, karena waktu itu ada kegiatan di Jakarta sekalian menanyakan ke Kemendagri tindak lanjutnya (eror pada penyesuaian RKPD)"

Biaya tersebut, yaitu 2 sampai 3 kali ke Jakarta untuk menindaklanjuti aplikasi yang tidak bisa digunakan dari bulan September sampai bulan November 2024 untuk menginput penyesuaian RKPD, merupakan biaya yang bukan berkenaan langsung, atau menumpang dari kegiatan lain yang memerlukan Dinas Luar ke Jakarta. Jadi tidak masuk dalam biaya aplikasi SIPD Perencanaan dan Penganggaran.

2. Pelayanan Publik yang Cepat dan Tepat

Pada proses penginputan data, terdapat masalah penginputan yang dialami Pemerintah Kabupaten Kaimana terkait penggunaan perbedaan sumber dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam proses pengalokasian APBD. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edwin Allongi (2024) Selaku Kabid Penrencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA adalah sebagai berikut

"Sebenarnya harapan kami pengembangan ke depannya, kami bisa memberikan pagu itu berdasarkan sumber dana. Kan selama ini cuma Dinas Pendidikan pagunya Rp300 miliar. Harapan kami sebenarnya bisa kami berikan Rp300 miliar itu, DAU sekian,

ini sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi operasinya saat nanti, nggak bisa melebihi itu. Benar-benar pas.”

Selanjutnya terkait permasalahan terkait lebih dari satu sumber dana untuk satu kegiatan Bapak Edwin Allongi (2024) selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA Kaimana menjelaskan lebih lanjut.

“Benar, benar sekali ya. ada juga satu kegiatan dari dua sumber dana Betul sekali ya. Nah itu yang cara gabunginnya itu memang susah, masih belum. Contohnya fisik. Fisik itu ada kita masukkan DBH migas sama DTI. Gimana caranya? Itu yang belum gak Mungkin kami pecah dia. Kita bikin kegiatannya sama, tapi satunya yang migas, Iya, kalau pembuatan jalan raya harus dibagi berapa kilo, pakai DBH berapa kilo. Sekarang kalau jembatan kan nggak bisa dibagi gitu Pak.”

Untuk permasalahan tersebut diberikan solusi oleh pak Boestami Aziz (2024) selaku Kabid Penganggaran BPKAD Kaimana.

“Untuk 2 sumber dana kita bikin kegiatannya sama, tapi satunya yang migas, kalau kegiatan raya harus dibagi berapa kilo, pakai DBH berapa kilo. Sekarang kalau jembatan kan nggak bisa dibagi gitu Pak, kalau nggak kita bangunnya dermaga.”

SIPD dalam menghimpun partisipasi publik, terdapat menu dimana kepala kampung di seluruh kabupaten Kaimana dapat menginput hasil Musrenbang kampung. Terdapat status terhadap kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Kampung di Aplikasi SIPD dan nantinya akan ada status jika usulan tersebut belum di proses, diterima, dan ditolak. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edwin Allongi (2024) selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA Kaimana.

“Kepala Kampung nanti menginput hasil musrenbang dan ditujukan untuk kabupaten atau provinsi. Sayangnya kan, kepala desa itu banyak yang belum bisa ninput Pak. Belum bisa lah kepala-kepala kampung. Jadinya akunnya itu, hasil musrenbang kampung, staff saya yang inputkan, melalui akun mereka.”

SIPD Dimana Pemerintah Kabupaten Kaimana sebagai pengguna, proses pelayanan terhadap input dan melihat laporan secara umum sudah baik, hanya terdapat kendala seperti server yang kadang overload dan mengakibatkan susah input bahkan Kaimana sendiri pernah mengalami kendala eror yang tidak bisa mengakses pergeseran anggaran. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edwin Allongi (2024) selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi.

“di Kaimana sendiri akibat hal itu ada terganggu operasionalnya, RKPD kami itu 2 bulan tidak dilakukan apa-apa pak.”

3. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya keuangan, aset, dan program pembangunan secara efektif dan efisien. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dapat membantu Pemda mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan berbasis data yang terintegrasi. SIPD memungkinkan Pemda untuk menyusun anggaran dengan lebih transparan dan akurat, menghindari tumpang tindih program antar dinas, serta memastikan bahwa alokasi dana daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Edwin Allongi (2024) selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA Kaimana sebagai berikut:

“Cuma sama tagging prioritas daerah aja pak. Kayak prioritas daerah yang kami melakukan itu priotas daerah bisa sama provinsi. Tagging prioritas nasional kami juga pernah lakukan.”

Tetapi hasil penelitian yang penulis temukan, SIPD Belum ada tagging Dana Otsus Perencanaan dan Penganggaran. Bapak Edwin Allongi (2024) selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi menjelaskan hal tersebut.

“Nah tagging Otsus ini yang kita cuma taggingnya itu sumber dana pak. Kayak untuk prioritas pusat, kami nggak ada menu untuk men-tagging sendiri. Karena ter-tagging langsung sub kegiatan yang mendukung prioritas pusat gitu. Cuma sama tagging prioritas daerah aja pak. Kayak priotas daerah yang kami melakukan itu priotas daerah bisa sama provinsi.”

Tagging Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat penting untuk memastikan pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel. Dana Otsus diberikan kepada daerah dengan status khusus, seperti Papua, Papua Barat, Aceh, dan beberapa daerah lainnya, dengan tujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Tanpa adanya fitur tagging dalam sistem, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memilah dan mengidentifikasi penggunaan Dana Otsus secara terpisah dari sumber dana lainnya, yang dapat menghambat pelaporan keuangan serta akuntabilitas kepada pemerintah pusat. Jika terdapat fitur tagging otsus di SIPD, setiap program atau kegiatan yang didanai oleh Dana Otsus dapat dipantau lebih efektif, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Fitur tagging Dana Otsus juga berperan dalam evaluasi efektivitas program pembangunan yang dibiayai oleh dana tersebut. Pemerintah pusat dan daerah dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana alokasi Dana Otsus telah memberikan dampak terhadap pembangunan daerah yang bersangkutan, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Jika tidak ada sistem tagging yang jelas, sulit untuk melakukan analisis mendalam terhadap pencapaian program berbasis Dana Otsus, serta mengidentifikasi tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan sistem tagging yang terintegrasi dalam SIPD, tidak hanya transparansi dan akuntabilitas yang meningkat, tetapi juga efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, sehingga Dana Otsus dapat lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang memiliki status khusus.

Kekurangan mungkin yang hanya terjadi, yaitu pembagian dana otsus yang dalam anggaran belum dibuatkan tagging dalam dana pendidikan, Kesehatan, Pembangunan dan lainnya. Tetapi ada Solusi dari pemerintah kabupaten Kaimana yaitu melihat perencanaan dan penganggaran dari sumber dana otsus dan memindai secara manual. Sesuai dengan pernyataan Edwin Allongi dengan wawancara sebagai berikut:

“Kan sudah dikeluarkan juga aplikasi namanya SIKD ya dari Kementerian Keuangan. SIKD untuk meng-input Otsus gitu pak. Cuma memang harapan kami ada interoperabilitas data antara SIKD dengan SIPD. Karena di Kabupaten agak capek meng-input. Jadi kami kenapa tidak SIKD saja yang ada tagging Otsusnya dalam situ? Jadi kami nggak perlu buka aplikasi lain, nggak perlu mindai-mindai-in.”

Tabel 2. Hasil Wawancara Efisiensi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara (efektivitas)			Simpulan
		Edwin Allongi (BAPPEDA)	Ruskanda (Insp.)	Boestami Aziz (BPKAD)	
1	Bagaimana penerapan SIPD di Pemerintah Kabupaten Kaimana	Oh gratis. Iya pelatihannya aja. Nggak. Waktu itu		Tidak ada pak, diklat tahunan	Biaya penggunaan SIPD Perencanaan dan Penganggaran

	mempengaruhi biaya operasional dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelumnya?	kami tidak buat pelatihan ke Jakarta. Memang waktu itu yang ke Jakarta cuma dari keuangan sama Bappeda. Untuk pendalaman dulu. Pertama kali		SIPD Pemkab Kaimana tidak ada	lebih menurun dibandingkan penggunaan aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA Perencanaan
2	Apakah penggunaan SIPD dapat menurunkan biaya pengelolaan keuangan atau justru ada biaya tambahan yang muncul selama implementasi dan operasional?	Tapi kalau yang di 2021 sampai selanjutnya PPM saja sudah cukup. Tidak ada pelatihan khusus.	Tidak ada diklat tahunan	Yang sudah paham membantu	Tidak ada biaya tambahan dan operasional yang muncul selama implementasi SIPD Perencanaan dan Penganggaran
3	Apakah penggunaan SIPD menurun setiap tahunnya?	"biaya" Oh gratis. Iya pelatihannya aja. Nggak. Waktu itu kami tidak buat pelatihan ke Jakarta. Memang waktu itu yang ke Jakarta cuma dari keuangan sama Bappeda. Untuk pendalaman dulu. Pertama kali		Tidak ada pak, diklat tahunan SIPD Pemkab Kaimana tidak ada	Biaya penggunaan SIPD Perencanaan dan Penganggaran lebih menurun dibandingkan penggunaan aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA Perencanaan.
4	Apakah output dari diklat atau implementasi SIPD optimal di Kabupaten Kaimana?	Ya laporannya lebih komplit. Kemudian untuk kita bisa query ya. Waktu itu Saya butuh data dalam bentuk Excel untuk saya olah lebih lanjut. Itu bisa waktu itu. Lumayan lengkap pak.	Kalau itu sih cepat sih laporannya keluar.	Lengkap pak, kita juga upload laporan sebagai dokumentasi di SIPD	Output implementasi SIPD, laporan lebih lengkap
5	Apakah penggunaan SIPD pada Kabupaten Kaimana meningkatkan kinerja, output dan outcome dari penggunaan APBD? (kinerja seperti penggunaan LRA sudah mencapai 50% pada bulan Juni)	Ya laporannya lebih komplit. Kemudian untuk kita bisa query ya. Waktu itu Saya butuh data dalam bentuk Excel untuk saya olah lebih lanjut. Itu bisa waktu itu. Lumayan lengkap pak.		SIPD up to date terhadap peraturan yang berlaku	SIPD Perencanaan dan Penganggaran meningkatkan kinerja dan output.

Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam proses verifikasi keuangan melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) perlu menginput ulang dari hasil perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIPD diinput ke Aplikasi SIKD. Aplikasi SIKD sudah menyediakan tagging otsus sebagai verifikasi APBD telah sesuai dialokasikan terhadap peraturan yang berlaku.

Pembahasan

A. Efektivitas SIPD

Indikator Efektivitas dalam konteks manajemen publik menurut Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2010) efektivitas dapat diukur melalui:

1. Ketepatan Sasaran

Efektivitas SIPD diukur melalui kemampuannya mengotomatisasi pencatatan keuangan, menyajikan laporan akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan Permendagri No. 70/2019, SIPD dirancang untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi berbasis elektronik yang dapat diakses melalui Kemendagri. Meskipun seluruh pemerintah daerah telah menggunakan SIPD untuk perencanaan dan penganggaran—memudahkan Kemendagri memantau proses tersebut secara efisien—hanya 65,37% daerah yang telah mengadopsi modul Akuntansi dan Pelaporan, sehingga integrasi data belum optimal. Di Kabupaten Kaimana, implementasi SIPD berjalan lancar berkat antarmuka yang intuitif, memungkinkan adaptasi dalam 6 bulan. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap data anggaran, bertentangan dengan prinsip transparansi dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

SIPD dibuat untuk mengatasi kesulitan pemerintah pusat dalam memantau perencanaan dan penganggaran daerah secara real-time, menggantikan aplikasi yang lambat beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Menurut Maurits (2023), SIPD fokus pada integrasi data pembangunan dan keuangan daerah untuk digunakan bersama instansi terkait. Namun, meski bertujuan meningkatkan akuntabilitas, akses masyarakat terhadap laporan keuangan di SIPD masih terbatas, berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap transparansi. Padahal, menurut Berliana (2024), akuntabilitas memerlukan akses mudah terhadap informasi. Untuk itu, Kemendagri perlu membuka akses data seluas-luasnya agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan, sekaligus memperkuat fungsi SIPD sebagai alat monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran jarak jauh.

2. Pencapaian Tujuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah dapat diukur melalui kemampuannya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi APBD. Keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada implementasi dan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah. Ketika berfungsi optimal, SIPD mempermudah perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan, sehingga selaras dengan kebijakan nasional. Namun, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kecepatan penyajian data real-time, akurasi informasi, serta kesiapan SDM dan infrastruktur daerah. Meskipun dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan SIPD umumnya lengkap dan mudah diakses, tantangan seperti gangguan akses—seperti yang dialami Pemerintah Kabupaten Kaimana selama 2 bulan—dapat mengganggu jadwal evaluasi anggaran dan menghambat proses pembangunan.

Meskipun gangguan akses SIPD di Kabupaten Kaimana tidak menimbulkan kerugian signifikan, keterlambatan dalam penyusunan APBD berpotensi menunda program pembangunan dan pencairan anggaran. Hal ini bertentangan dengan PP No. 12/2019 yang mewajibkan pengajuan rancangan APBD tepat waktu untuk menghindari sanksi administratif. Untuk mencegah masalah serupa, Kemendagri perlu menyusun SOP yang menjamin ketersediaan aplikasi tanpa gangguan, termasuk tenggat waktu perbaikan sistem. Dengan demikian, SIPD dapat benar-benar mendukung tata kelola keuangan

daerah yang efektif dan akuntabel, sekaligus memastikan kelancaran perencanaan pembangunan.

3. Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap sistem yang tidak dapat langsung dirasakan adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana sistem tersebut bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat tidak diberikan cukup informasi mengenai manfaat jangka panjang dari sistem yang diterapkan, mereka cenderung menilai efektivitas sistem hanya berdasarkan hasil instan yang dapat mereka rasakan, seperti kecepatan pelayanan administrasi atau peningkatan sarana publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dampak dari sistem tersebut kepada masyarakat serta menunjukkan bagaimana sistem yang diterapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, meskipun manfaat sistem tidak langsung dirasakan, masyarakat tetap memahami perannya dan merasa puas dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program SIPD-RI akan terwujud jika seluruh pemerintah daerah menggunakan semua modulnya, memungkinkan pemerintah pusat melalui Kemendagri memanfaatkan data terintegrasi untuk perencanaan pembangunan, pengawasan keuangan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan SIPD secara optimal mengurangi risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan laporan keuangan, sekaligus menjamin keberlanjutan sistem tanpa perlu pelatihan berulang, didukung pula oleh efisiensi biaya operasional tahunan dan pengurangan pengeluaran untuk dokumen fisik melalui digitalisasi sebagai wujud implementasi Satu Data Indonesia. Namun, penelitian menunjukkan bahwa potensi SIPD sebagai alat pengawasan oleh Inspektorat belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memantau realisasi anggaran, mendeteksi penyimpangan, serta melakukan audit sistem guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi SIPD-RI melalui rekomendasi perbaikan.

B. Efisiensi SIPD

SIPD Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Kaimana telah menghasilkan efisiensi dari segi sumber daya dan proses pengerjaan. Sebelumnya dengan SIMDA Perencanaan yang berbasis desktop yang harus terkoneksi server lokal, yang mana area penginputannya hanya bisa menjangkau sekitar area server dengan system LAN. SIPD Perencanaan dan Penganggaran berbasis Web based yang mana seluruh pegawai yang melakukan proses input dapat menginput dimanapun dan tidak terbatas memakai laptop atau computer. Hal ini sangat baik, tetapi dalam implementasinya ditemukan kendala seperti server yang penuh.

Pembahasan terkait Indikator Efisiensi dalam konteks manajemen publik menurut Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015) adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan anggaran terhadap realisasi program

Efisiensi SIPD berdasarkan sumber daya terkait dengan input dan output. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output berupa pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan input. Penelitian ini mengevaluasi efisiensi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) berdasarkan penggunaan sumber

daya, di mana efisiensi diukur dari kemampuan menghasilkan output maksimal dengan input minimal (Mahmudi, 2015). SIPD memanfaatkan sumber daya seperti infrastruktur teknologi, SDM, waktu, dan kebijakan, dengan biaya langsung (hardware, pelatihan, aplikasi) dan tidak langsung (pemeliharaan server, adaptasi pegawai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD meningkatkan efisiensi, khususnya dalam pengurangan biaya pelatihan karena antarmukanya yang intuitif—pegawai Kabupaten Kaimana hanya membutuhkan 6 bulan untuk mahir tanpa pelatihan formal. Dari segi biaya langsung, SIPD lebih efisien dibanding sistem sebelumnya (SIMDA Perencanaan) karena tidak memerlukan rekrutmen tambahan, upgrade perangkat, atau biaya lisensi. Kendala seperti gangguan server dapat diatasi dengan menginput data pada jam kurang sibuk (08:00–10:00 WIT). Keunggulan SIPD sebagai sistem berbasis web mencakup pembaruan kebijakan secara serentak, keamanan data terpusat oleh Kemendagri, serta tidak adanya biaya pemeliharaan bagi pemerintah daerah. Berbeda dengan SIMDA yang rentan kehilangan data dan memerlukan instalasi manual, SIPD menawarkan solusi lebih stabil dan berbiaya rendah dalam jangka panjang.

2. Pelayanan Publik yang Cepat dan Tepat

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) di Kabupaten Kaimana menghadapi beberapa kendala, terutama terkait ketidakmampuan sistem mengakomodasi kegiatan dengan multi-sumber pendanaan yang menyebabkan ketidaksesuaian dokumen dan masalah akuntabilitas. Selain itu, meskipun SIPD dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, implementasinya belum optimal di tingkat kampung karena keterbatasan pemahaman kepala kampung dalam menginput data aspirasi masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan program dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga diperlukan pelatihan intensif dan bimbingan teknis bagi aparat desa agar dapat memanfaatkan SIPD secara efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara tepat.

3. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah

Pada hasil penelitian, sistem ini belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi kebutuhan daerah dengan status Otonomi Khusus (Otsus). Salah satu kelemahan sipd adalah tidak adanya fitur tagging khusus untuk dana Otsus, yang menyebabkan kesulitan dalam pelacakan, pengelolaan, dan evaluasi penggunaan anggaran yang berasal dari alokasi khusus pemerintah pusat. Hal tersebut diatasi Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan cara memisahkan kegiatan berdasarkan sumber dana Otsus. Permasalahan tersebut untuk lebih jelasnya terkait tagging Dana Otsus terhadap pengelolaan daerah, Pemerintah Kabupaten Kaimana juga meng-input kegiatan otsus pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Walaupun belum adanya interoperabilitas terkait SIKD dan SIPD-RI sehingga Pemerintah Daerah menginput 2 hal yang sama di aplikasi berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Kaimana, implementasi SIPD RI masih terbatas pada modul perencanaan dan penganggaran, sementara modul akuntansi dan pelaporan belum digunakan sepenuhnya, menunjukkan belum siapnya daerah untuk sepenuhnya beralih ke SIPD RI dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Meskipun implementasi SIPD Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Kaimana

berjalan baik, terdapat beberapa kendala teknis seperti masalah akses server pada jam sibuk yang menyebabkan keterlambatan evaluasi anggaran, sehingga jadwal evaluasi KUA-PPAS molor dari September ke November 2024, serta keterbatasan fitur seperti tidak adanya tagging khusus untuk Dana Otsus yang menyulitkan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran khusus. Selain itu, peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan melalui SIPD RI belum optimal, dan meskipun SIPD efisien dari segi biaya aplikasi dan pelatihan, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi waktu dan tenaga karena belum adanya interoperabilitas dengan sistem lain seperti SIKD yang mengharuskan input data berulang, serta tidak tersedianya fitur untuk menginput satu kegiatan dari multi-sumber dana, menyulitkan proses penganggaran dan pelacakan output kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2). <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Askal Basir, M. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *JEK: Jurnal Efek Komunikasi*, 2(2).
- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Basir, M. A. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *JEK: Jurnal Efek Komunikasi*, 2(2).
- Berliana, D., Setiawan, A. B., & Jamaludin Aziz, A. (2024). The Effect of Presentation and Transparency of Financial Reports on Accountability of Financial Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(4), 513–522. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i4.2761>
- David, Y. Y., & Ohoiwutun, Y. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*, 5(3). <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i1.2426>
- Fahyuni, E. F. (2017). *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam)*. Umsida press.
- Laila, A., Ardiansyah, A. H., D.S., A. V., & Purnamasari, F. (2021). Penerapan Audit Teknologi Informasi di Era Digital (Studi Kajian Teoritis). *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(2), 50–57.
- Meilina, L., Kumara, I. N. S., & Setiawan, I. N. (2021). Literature Review Klasifikasi Data Menggunakan Metode Cosine Similarity dan Artificial Neural Network. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20(2). <https://doi.org/10.24843/mite.2021.v20i02.p15>
- Moleong, J. L. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Ros Dakarya. Penelitian Skripsi

- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109-116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Primawanti, E. P., & Ali, H. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 267–285.
- Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Nainggolan, L. E., & Sudirman, A. (2020). Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi. Dalam *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2, Nomor 1).
- Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4). <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>
- Sobandi, A., Sopyan Febrianto, A., & Susita Herdiant, D. (2023). Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. *Manajerial : Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 22(1).
- Vira, Y., & Husna, C. A. (2022a). Implementasi Sipd (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(9). <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i9.68>
- Vira, Y., & Husna, C. A. (2022b). Implementasi Sipd (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(9). <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i9.68>
- Yoraeni, A., Basri, H., & Puspasari, A. (2022). PENERAPAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN MEWUJUDKAN SMART VILLAGE. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10655>